

BAB IV

ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA PERSPEKTIF ABDURRAHMAN WAHID

A. Islam dan Negara di Indonesia Menurut Abdurrahman Wahid

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari nilai-nilai keagamaan. Hal ini dapat dilihat dari masalah-masalah pribadi seperti peraturan hubungan antar manusia, masalah penyesuaian antara cita dan kenyataan dalam kehidupan, serta hubungan antara manusia dengan kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Dari hal inilah menghasilkan nilai-nilai keagamaan yang tertanam dalam kehidupan manusia. Tidak hanya dalam kehidupan pribadi, namun nilai-nilai keagamaan juga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat seperti dalam pemerintahan.¹

Dalam al-Quran pengertian agama tidak diterangkan secara definitif, akan tetapi diterangkan bahwa Islam adalah *dien* yang diajarkan oleh nabi Muhammad, dengan berpedoman al-Quran yang berarti risalah yang diwahyukan kepada nabi Adam, Ibrahim, Musa, Isa, dan disempurnakan oleh nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan sebagai Rasul. Agama Islam merupakan agama yang sempurna yang di dalamnya terdapat hukum dan aturan untuk dijadikan petunjuk dan pedoman umat manusia.²

Kaitan antara wawasan Islam universal, supranasional, dan kebangsaan dari sebuah masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang fungsional keduanya. Dalam

¹Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, Depok: DESANTARA, 2001, cet. 1, hlm. 71.

²Suyuti Pulungan, *Fiqh Syiyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, PT. Grafindo Persada, Jakarta: 1997, Hlm. 2.

hal ini, Islam dilihat dari fungsinya yaitu sebagai pandangan hidup bagi masyarakat yang mementingkan kesejahteraan bangsa serta mengembangkan nilai-nilai keislaman sebagai etika masyarakat. Bagi kehidupan masyarakat bangsa, Islam berfungsi tidak sebagai bentuk kenegaraan tertentu, tetapi sebagai etika sosial yang menuntun kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³

Kalangan minimalis berpendapat bahwa suatu negara sudah memiliki “watak Islam” seperti ajaran tentang Keesaan Tuhan. Dalam hal ini, Islam berfungsi inspirasional yaitu sebagai pendorong munculnya legislasi dan peraturan negara yang manusiawi tetapi tidak menentang ajaran Islam. Sebaliknya, ada kalangan optimalis yang menginginkan ajaran Islam dilaksanakan sepenuhnya. Suatu negara harus di Islamkan secara tuntas.⁴

Dalam kenegaraan, Islam menginginkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat bukannya modernisasi yang penuh kenikmatan bagi sekelompok orang. Ini merupakan prinsip yang sangat menentukan bagi kehidupan sebuah masyarakat sehingga antara negara dan warganya harus memiliki hubungan yang dinamis. Jika negara mampu menciptakan kemakmuran bagi warganya, maka negara sudah menunaikan kewajibannya untuk menciptakan kesejahteraan dan mampu melindungi warganya.⁵

Pemimpin negara (Presiden) RI yang ke 4 Abdurrahman Wahid (selanjutnya ditulis Gus Dur) merupakan tokoh intelektual yang disegani di Indonesia. Pemikiran Gus Dur sangat menarik namun juga sulit. Menarik karena ide-idenya

³Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, Jakarta, PT. Grasindo, 1999, hlm. 74-75.

⁴Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu di Bela*, Yogyakarta, Saufa, 1999, hlm. 21.

⁵Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: Democracy Project, 2011, hlm. 94-96.

yang sederhana, namun mampu memberikan wawasan tersendiri dalam menganalisis permasalahan. Terbilang sulit karena pemikirannya terkadang keluar dari kultur pesantren dan NU. Namun hal itu tidak mengurangi kecintaannya terhadap kebudayaan Islam Tradisional.

Kencintaan Gus Dur terhadap kebudayaan Islam tradisional dapat dilihat dari karakter pemikirannya yang penuh warna-warni dan penuh misteri. Hal ini juga tampak pada tulisan dan perbincangannya bahwa Gus Dur adalah orang yang sangat mencintai agamanya. Islam baginya adalah agama yang penuh kasih sayang dan toleran serta agama kejujuran dan keadilan yang mengakui bahwa di dalam pandangan Tuhan semua manusia setara tidak ada yang membedakan baik itu ras, suku, gender, maupun kelas sekalipun.⁶

Gus Dur menggambarkan Islam ada tiga. *Pertama*, Islam yang dipikirkan dan dialami Gus Dur adalah Islam yang khas, yang diistilahkan Islam ku (Islamnya Gus Dur), tetapi tidak untuk dipaksakan terhadap orang lain.⁷ *Kedua*, Islam Anda sebagai refleksi dan apresiasi terhadap ritual keagamaan (tradisional) yang hidup dalam masyarakat. *Ketiga*, Islam Kita merupakan kesimpulan dari Islam Ku dan Islam Anda memiliki watak yang bersifat umum dan menyangkut kaum muslimin di manapun keberadaannya demi kepentingan Islam di masa depan.⁸

Kejayaan Islam menurut Gus Dur dapat dilihat pada kemampuan agama untuk berkembang secara kultural dan ia memberikan apresiasi penuh kepada upaya kulturalisasi tersebut. Tetapi, Gus Dur menolak adanya formalisasi untuk

⁶Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta: LkiS, 1999, hlm. xxviii.

⁷Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, ...*, hlm. xv.

⁸Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, ...*, hlm. 66-68.

mewujudkan “sistem Islam” karena hal itu akan mengabaikan pluralitas masyarakat. Dampak dari situasi ini akan menjadikan warga negara non muslim menjadi warga negara kelas dua. Bagi Gus Dur untuk menjadi muslim yang baik haruslah menerima prinsip-prinsip keimanan, menjalankan rukun Islam, menolong sesama, menegakkan profesionalisme, dan bersikap sabar dalam segala hal. Konsekuensinya, mewujudkan sistem Islami tidaklah menjadi syarat bagi seseorang untuk diberi predikat muslim yang taat.⁹

Gus Dur menolak jika Islam dijadikan sebagai asa pancasila. Sebab, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, budaya, serta memiliki beberapa agama yang diyakini masyarakatnya. Walaupun Islam tidak menjadi asas negara Indonesia, tetapi esensi syari’ah sudah terkandung dalam falsafah hidup bangsa Indonesia, yakni pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama); penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kedua); adanya persatuan seluruh rakyat Indonesia yang mendahulukan kebersamaan atau jamaah (sila ketiga); kepemimpinan yang bijaksana dengan sistem musyawarah dan perwakilan (sila keempat); menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia, serta melindungi dan memberi keadilan (sila kelima). Diantara sila dalam pancasila tersebut, tak ada satu pun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bertentangan dengan ajaran agama manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Membahas tentang formalisasi, Gus Dur menolak adanya ideologisasi Islam. Karena baginya, ideologi Islam tidak sesuai dengan perkembangan Islam

⁹Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, ...*, hlm. xvi.

Indonesia yang terkenal dengan “negerinya kaum muslim moderat”. Menurut Gus Dur, ideologisasi Islam mendorong umat Islam dalam upaya-upaya politis yang mengarah pada penafsiran tekstual dan radikal terhadap teks-teks keagamaan. Implikasi yang paling nyata dalam ideologisasi Islam yaitu adanya sebagian kelompok yang ingin menjadikan Islam sebagai Ideologi negara.¹⁰

Sebagaimana dikutip oleh Mochammad Agung Mustofah, Gus Dur mengatakan bahwa Islam berfungsi penuh dengan kehidupan sebuah masyarakat bangsa melalui pengembangan nilai pengembangan nilai-nilai dasarnya sebagai etika masyarakat yang bersangkutan. Islam berfungsi bagi kehidupan masyarakat bangsa tidak sebagai untuk kenegaraan tertentu, tetapi sebagai etika sosial yang memandu jalannya kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Islam ingin menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi umat manusia.¹¹

Dalam suatu pemerintahan negara harus memberikan kebebasan bagi rakyat untuk mendukung hak dan kewajibannya. Menurut Gus Dur, tujuan dari mendirikan negara adalah untuk kesejahteraan rakyatnya. Dalam hal ini adanya pemisahan antara pemikiran Negara dan Islam. Pemikiran negara adalah tentang bentuk negara beserta hukum-hukum di dalamnya. Sedangkan Islam merupakan pemikiran tentang kesejahteraan rakyat dari segi agama. Agama adalah faktor utama yang memberikan perspektif dinamis bagi kehidupan dalam pertanggung jawaban manusia terhadap sang Pencipta.¹²

¹⁰Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda,...*, hlm. xvii.

¹¹Mochammad Agung Mustofah, *Islam dan Negara (Analisis Pemikiran Abdurrahman Wahid)*, Surabaya, Iain Sunan Ampel, 2010, hlm. 66.

¹²Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama...*, hlm. 99.

Bagi Gus Dur, ideologi Islam tidak sesuai dengan perkembangan Islam di Indonesia, yang dikenal dengan negeri kaum Muslim moderat. Lebih lanjut menurut Gus Dur, Islam di Indonesia muncul dalam keseharian kultural yang tidak memakai ideologi. Di sisi lain, Gus Dur melihat bahawa ideologi Islam amat mudah mendorong umat Islam kepada upaya politik yang mengarah kepada pentafsiran tekstual dan radikal terhadap teks-teks keagamaan. Implikasi paling nyata dari ideologi Islam ini adalah adanya usaha sejumlah kalangan untuk menjadikan Islam sebagai ideologi alternatif terhadap Pancasila. Serta keinginan sejumlah kelompok untuk memperjuangkan kembalinya Piagam Jakarta.¹³ Juga langkah-langkah sejumlah pemerintah daerah dan DPRD yang mengeluarkan peraturan daerah berasaskan kepada “Syari`at Islam”. Menurut Gus Dur upaya untuk mengIslamkan dasar Negara dan mensyari`atkan peraturan-peraturan daerah tersebut adalah bertentangan dengan sejarah dan UUD 1945.

Penolakan Gus Dur terhadap formalisasi, ideologi Islam dan Syari`at Islam mendorongnya untuk tidak menyetujui gagasan tentang negara Islam. Bahkan lebih jauh lagi Gus Dur memandang gerakan pemikiran yang ingin mendirikan negara Islam sebagai “Musuh dalam Selimut”. Mereka yang ingin menjadikan Negara berasaskan kepada Islam dianggap sebagai kelompok garis keras yang harus dilawan dengan alasan untuk mengembalikan kemuliaan dan kehormatan

¹³Piagam Jakarta adalah hasil kompromi tentang dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan dan disetujui pada tanggal 22 Jun 1945 antara pihak Islam dan kaum kebangsaan (nasionalis). Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H.A. Salim, Achmad Subardjo, Wahid Hasjim, Dan Muhammad Yamin. Lihat Kamarudin Salleh, Khoiruddin Bin Muhammad Yusuf, *Gus Dur dan Pemikiran Liberalisme*, Ar-Raniry: International Journal Of Islamic Studies Vol. 1, No.2, Desember 2014, hlm. 281.

Islam yang telah mereka nodai dan menyelamatkan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Pandangan Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Islam dengan Negara di Indonesia

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah menemukan suatu formulasi yang khas tentang hubungan Islam dengan negara, di tengah-tengah negara

yang ada di dunia, yaitu negara sekuler, negara ateis, dan negara teokrasi.

Para pendiri negara tersebut menyadari bahwa “kausa materialis” negara Indonesia adalah pada bangsa Indonesia itu sendiri. Bangsa Indonesia sejak zaman dahulu adalah negara yang religius, yang mengakui adanya Tuhan ‘Dzat Yang Maha Kuasa’, hal ini merupakan suatu dasar ontologis bahwa manusia sebagai warga negara adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa.

Situasi hubungan antara Islam dan negara di Indonesia tidak berbeda dengan apa yang dialami kawasan dunia Islam lainnya. Hubungan antara Islam dan negara dimulai dari awal terbentuknya dasar Negara Indonesia dimana terjadi perang wacana antara dua kelompok, kelompok pertama nasionalis dan kelompok kedua adalah Islam. Ketegangan ini berangsur terhenti setelah Ormas Islam menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasinya pada pertengahan 1980-an.

Persoalan tentang Islam dan negara sudah diperdebatkan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Islam menurut beberapa tokoh muslim merupakan sebuah kepercayaan dan memiliki hubungan yang erat dengan negara. Islam memberikan pandangannya terhadap dunia dan makna kehidupan bagi individu maupun

kelompok masyarakat. Seperti halnya yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia khususnya pada hukum tentang perkawinan, perceraian, dan waris Islam yang sudah berlandaskan pada syari'at Islam.¹⁴

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural yang memiliki beragam suku, budaya, etnis, dan agama. Oleh karena itu Islam tidak pas jika dijadikan sebagai ideologi negara, sebab akan menciptakan kecemburuan dan deskriminasi terhadap kaum non-Islam. Pemerintah harus memberikan perlakuan yang adil terhadap agama-agama yang diakui di negara ini dan bersifat toleran terhadap umat yang beragama lain. Kondisi ini sangat menggembirakan karena mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dari pada nilai-nilai keagamaan dan dapat berinteraksi dengan umat agama lain.¹⁵

Agama dan Pancasila memiliki fungsi masing-masing, sehingga tidak dapat diidentikkan secara menyeluruh. Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Sedangkan agama merupakan landasan keimanan masyarakat dan menjadi motivasi, yang memberikan kekuatan spiritual pada setiap kegiatannya. Antara agama dan Pancasila terdapat hubungan simbiotik, yang satu tidak dapat hidup di Indonesia tanpa yang lain. Hubungan inilah yang menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, bukan hanya sekedar ideologi negara saja.¹⁶

Pancasila sebagai Ideologi negara merupakan bagian kehidupan politik suatu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Politik menurut Gus Dur bersifat manusiawi karena dalam tatanan praktik politik, manusia harus menjadi

¹⁴Abdurrahman Wahid, *Membaca Sejarah Nusantara:25 Kolom Sejarah Gus Dur*, Yogyakarta, LkiS, 2010, hlm. 16.

¹⁵Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama...*, hlm. 40.

¹⁶Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama...*, hlm. 99-100.

landasan normatis dari tata pemerintahan. Dalam membela negaranya, Gus Dur rela kehilangan kepercayaan rakyat, karena baginya, ada sikap politik yang tidak perlu dijelaskan kepada masyarakat. Untuk hal ini, Gus Dur berani mengambil resiko menjadi umpatan massa.¹⁷

Dalam hal yang paling dasar, Pancasila berfungsi mengatur kehidupan bangsa, sedangkan Islam memberikan kepada kolektivitas tersebut tujuan kemasyarakatan. Tanpa tujuan kemasyarakatan yang jelas dengan nyata, hidup bangsa kita hanya akan berputar-putar pada siklus pertentangan antara cita pemikiran dan kecenderungan naluriah alamia belaka. Islam sebagai agama justru menyatukan kedua unsur mutlak kehidupan dalam sebuah kerangka etis yang paripurna. Kerangka etis seperti itulah yang seharusnya melandasi moral Pancasila sebagai aturan permainan paling dasar bagi bangsa dan negara. Jelaslah dengan demikian, antara agama dan Pancasila terdapat hubungan simbiotik. Hubungan simbiotik itulah yang memunculkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Secara filosofis relasi ideal antara Islam dengan negara, prinsip dasar negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti setiap warga negara bebas beragama atau memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya. Kebebasan dalam hal ini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan dalam tingkat individu. Dapat juga diartikan bahwa agama merupakan persoalan individu bukan persoalan negara. negara dalam hubungan ini menjamin

¹⁷Abdurrahman Wahid, *Kiai Nyentrik Membela Pemerintahan*, Yogyakarta, LkiS, 1997, cet. 2, hlm. xv.

secara yuridis dan memfasilitasi agama agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah merasa aman, tentram, dan damai.

Terlepas dari ideologi negara, ada tiga bentuk negara yaitu:

1. Negara Agama

Negara memilih agama untuk dijadikan sebagai dasar negara, seperti halnya negara Islam. Tetapi, dalam sejarah ada beberapa negara agama yang berubah menjadi negara yang tidak formal seiring berjalannya waktu. Contohnya adalah Turki, yang mulanya merupakan negara agama berubah menjadi negara sekuler. Walaupun berubah menjadi negara sekuler, masyarakat Turki tetap bersifat religius.

2. Negara Sekuler

Negara memisahkan dengan tegas antara wilayah agama dan negara dan menganggapnya sebagai wilayah yang berbeda. Tetapi, negara tetap memberikan kebebasan warga negaranya untuk memeluk agama masing-masing. Negara sekuler ini hanya fokus pada kesejahteraan masyarakatnya dengan memberi pelayanan terkait hal selain keimanan atau agama.

3. Negara Ideologi

Negara yang tidak menjadikan agama tertentu sebagai dasar negaranya, tetapi mengambil nilai-nilai agama sebagai spirit konstitusi dalam

negara dan sebagai moral masyarakatnya. Dan membentuk Undang-Undang untuk mengatur hukum dalam negaranya.¹⁸

Indonesia masuk ke dalam bagian negara yang terakhir. Dalam kemerdekaan, suatu bangsa harus melakukan kegiatan bermasyarakat karena merupakan kewajiban dalam bernegara. Antara keduanya harus saling mendukung, sehingga tidak ada yang saling merugikan. Jika masyarakat menjalankan ajaran Pancasila dalam hidupnya, berarti telah menegakkan ideologi negara dan pandangan hidup bangsa. Dengan berasaskan Pancasila, berarti negara telah mengaitkan peraturan-peraturan negara dengan kebiasaan hidup masyarakat.

Di Indonesia, antara Islam dengan negara harus disandingkan dalam perspektif kesejarahan yang tepat. Bagaimana mungkin didirikan “negara Islam” kalau tidak ada kejelasan mengenai siapa yang akan menjadi pengambil keputusan tertinggi? Begitu juga tentang persyaratan pemimpin negara. Negara menjamin hak kaum muslimin untuk menjalankan *syari’ah* agama walaupun negara tidak mencantumkan Islam sebagai agama resmi. Hal ini juga ditegaskan oleh Presiden Soeharto kepada para sesepuh NU, bahwa pancasila menjamin hak umat beragama Islam melaksanakan *syari’ah* agama. Pancasila menjamin hak masyarakat untuk melaksanakan kewajiban agamanya masing-masing.¹⁹

Relasi Islam dengan negara sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi disaat pembangunan di negara berkembang seperti Indonesia. Namun, adanya keterlambatan bahkan penghentian pembangunan yang terjadi

¹⁸Mangisi S.E Simorangkir, Zully Qodir, DKK, *Mempercakapkan Relasi Agama dan Negara: Menata Ulang Hubungan Agama dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 46-47.

¹⁹Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama...*, hlm. 92.

akibat kesalah pahaman antara pihak penaanggung jawab ideologi negara dan pemimpin gerakan-gerakan keagamaan. Gus Dur mempunyai pendapat yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, pendapatnya:

Retorika politik disusun sedemikian rupa, untuk membungkus kenyataan pahit tersebut serapat mungkin, guna tidak menimbulkan gejala baru yang akan membuat keadaan semakin parah. Dalam pada itu, retorika politik digunakan bersamaan dengan tindakan-tindakan berganda untuk melemahkan gerakan-gerakan keagamaan. Di satu pihak, gerakan-gerakan keagamaan “dijinakkan” dengan bantuan negara dalam jumlah yang sangat besar untuk peribadatan ritual, sedang dipihak lain didukung upaya untuk memojokkan gerakan-gerakan keagamaan yang memiliki aspirasi politisi yang berwatak korektif terhadap politik pemerintahan.²⁰

Bentuk negara Indonesia, menurut Gus Dur adalah keputusan yang final. Negara Indonesia mengakui legitimasi peranan agama dalam kehidupan masyarakat, jika perlu melalui jalur pemerintahan. Secara *eksplisit* Pancasila tidak menyebutkan landasan keagamaan dalam kehidupan bernegara, tetapi secara *implisit* ia menudukung pemerintahan yang menunjang kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, muncullah kesadaran berbangsa sebagai penggerak cita-cita bangsa.²¹

Untuk melihat relasi Islam dan negara, Gus Dur menggunakan pendekatan fiqh mengikuti tradisi Walisongo dan pendekatan sosio-kultural.

1. Pendekatan Fiqh

Pendekatan fiqh atau pendekatan agamis dan sering disebut pendekatan spiritual karena sangat kental dengan dimensi spritualnya. Gus Dur sangat menekankan pendekatan spiritual ini, bahkan dalam lembaga yang melibatkan non-muslim digunakan pendekatan spiritual untuk

²⁰Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur...*, hlm. 2-3.

²¹Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu di Bela...*, hlm. 94.

menumbuhkan kesadaran yang mampu mendorong transformasi individual maupun sosial, dengan tujuan membentuk pribadi-pribadi yang tenang dan damai atau manusia yang berakhlak mulia. Pendekatan spiritual juga bisa dinamakan pendekatan kultural, karena tidak berpretensi untuk mengubah “struktur” yang ada, seperti peran pimpinan agama yang hanya mengajarkan agama bagi perbaikan pribadi. Namun pendekatan kultural bisa mengarah pada “ideologi kultural” yang menuntut penciptaan masyarakat Islam yang tuntas.²²

2. Pendekatan Sosio-Kultural

Perlawanan kultural akan mencapai tujuannya apabila diletakkan dalam kerangka lebih luas dari apa yang dimilikinya. Kultural tidak lagi cukup hanya jadi ekspresi keimanan sebagai muslim untuk menegakkan ajaran formal Islam saja, tetapi harus menjadi bagian dari upaya kemanusiaan umum untuk membebaskan rakyat yang tertindas dari belenggu kenistaan dan kehinaan yang menurunkan derajatnya sebagai makhluk mulia.²³

Dengan pendekatan sosio-kultural, Islam tidak hanya bagi keperluan spiritualitas pribadi, tapi juga bagi nilai yang akan menjiwai masyarakat, termasuk masyarakat politik (negara). Karena Gus Dur melihat negara pancasila merupakan negara sekuler yang tidak sekularism. Baginya

²²Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta, The Wahid Institute, 2009, hlm. 13.

²³Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur...*, hlm. 67.

pancasila harus dimaknai sebagai ideologi negara terbuka yang harus menjunjung tinggi mekanisme demokrasi.²⁴

Demokrasi adalah inti dari pemikiran Gus Dur, segala sesuatu yang menyangkut pemikirannya dan tindakan politiknya bertujuan untuk menegakkan demokrasi. Gus Dur bercita-cita menegakkan masyarakat yang demokratis, di dalamnya harkat dan martabat manusia dihargai. Tegaknya masyarakat yang demokratis harus didukung dari berbagai faktor seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanan, karena konsep demokrasi tidak bisa berdiri sendiri.

Model hubungan antara Islam dan negara yang berupa pengejawantahan agama dalam ideologi negara dan pandangan hidup bangsa merupakan kerangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang seharusnya diikuti oleh kaum Muslimin. Karena dalam Negara Indonesia, yang susunan warga negara dan situasi geografisnya sangat majemuk, Islam ternyata bukan satu-satunya agama yang ada, negara harus memberikan pelayanan yang adil kepada semua agama yang diakui. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa Pancasila dan Islam tidak memiliki pola hubungan yang bersifat polaritatif, tetapi pola hubungan dialogis, yang sehat, yang berjalan terus menerus secara dinamis.

Selain merumuskan hubungan simbiotik antara Islam dan negara, yang merupakan hubungan itu antara keduanya, sebagai sebuah upaya penyelesaian yang sementara ini terus-menerus terjadi. Abdurrahman Wahid juga menawarkan sebuah konsesi bagi pengejawantahan hukum Islam yang dinamakannya dengan

²⁴Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur...*, hlm. 30.

Primbumisasi Islam. Bahkan lebih jauh, Abdurrahman Wahid menginginkan Islam yang berkembang di Indonesia adalah Islam yang tetap mampu melestarikan akar-akar budaya lokal. Hal ini sebagaimana yang dikatakannya.:

Bagaimana melestarikan akar-akar budaya lokal yang telah memiliki Islam di negeri ini? Mengapa harus menggunakan kata shalat, kalau kata 'sembahyang' juga tidak kalah benarnya? Kesemuanya di atas membawakan tuntutan untuk membalik arus perjalanan Islam di negeri kita, dari formalisme berbentuk "Arabisasi total" menjadi kesadaran akan perlunya dipupuk kembali akar-akar budaya lokal dan kerangka kesejahteraan kita sendiri ini, kata Pribumi Islam itu lebih tepat diterapkan karena tidak ada kata lain yang tepat untuk menggambarkan hubungan Islam dan negara, yang dipribumikan adalah manifestasi kehidupan Islam belaka.²⁵

Dalam merealisasikan Islam dengan Negara di Indonesia, Gus Dur memberikan dua tawarana yaitu menjadikan Islam sebagai etika sosial dalam kehidupan bernegara dan pribumisasi Islam. Hukum agama tidak akan kehilangan kebesarannya dengan berfungsi sebagai etika masyarakat. Bahkan kebesarannya akan memancar, karena itu mampu mengembangkan diri tanpa dukungan massif dari institusi negara. Beragama Islam artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah, adalah tujuan hidup yang luhur. Karenanya haruslah dihindarkan agar Islam tidak diletakkan di bawah wewenang negara, melainkan menjadi kesadaran kuat dari warga masyarakat. Selain sebagai etika sosial bernegara, ada juga pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam merupakan cita-cita untuk mengembangkan Islam sesuai dengan corak setempat. Hal ini bertujuan agar Islam bisa tumbuh tanpa menyingkirkan dan mengkonfrontasi dengan nilai-nilai budaya lokal yang

²⁵Abdurrahman Wahid. *Tabayun Gusdur, Pribunisasi Islam, hak minorita, reformasi kultural*. LKIS. Yogyakarta. 1998. hal 92-93.

bersifat positif, tetapi juga agar budaya lokal tidak sampai merusak sendi-sendi Islam.

Relasi antara Islam dan negara di Indonesia menurut Gus Dur, ada beberapa pendapatnya. *Pertama*, Gus Dur selalu ingin menjaga independensi keberagaman masyarakat dalam menghadapi negara, karena ketaatan seseorang harus muncul dari kesadaran pribadi, bukan dari paksaan negara. *Kedua*, penolakan Gus Dur terhadap sebagian masyarakat muslim yang ingin menjadikan Islam sebagai ideologi negara, merupakan konsekuensi dari pemahaman demokrasi yang ia perjuangkan, yakni menempatkan masyarakat secara egaliter di hadapan negara. Karena pengistimewaan agama tertentu dalam negara yang plural ini, berarti pengingkaran nilai-nilai demokrasi. *Ketiga*, negara tidak boleh mengintervensi urusan-urusan agama masyarakat. Begitu juga sebaliknya agama tidak perlu mengemis legitimasi kepada negara karena hal tersebut bukan menguatkan eksistensi agama sebagai kepercayaan, melainkan justru merendahkan.

Sistem demokrasi menurut Gus Dur tersebut merupakan sistem yang paling realistis untuk mewujudkan terbentuknya suatu masyarakat yang adil, egaliter dan manusiawi sebagaimana yang dicita-citakan Islam. Karena dengan adanya nilai-nilai dasar di atas Islam bisa dikatakan sebagai agama pembebas sepenuhnya kompatibel dengan aturan demokrasi. Gus Dur ingin menegakkan demokrasi yang seutuhnya, artinya tidak ada tendensi agama yang melekat pada konsep ini.